

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

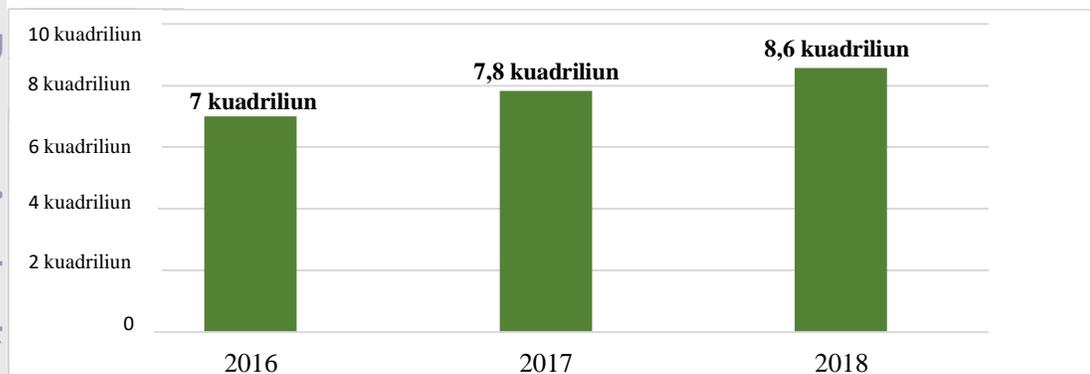
Indonesia merupakan negara dengan banyak pelaku usaha di dalamnya. Pelaku usaha memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) Republik Indonesia tentang Perkembangan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2017-2018, pelaku UMKM pada tahun 2018 menguasai unit usaha di Indonesia dengan persentase jumlah pelaku UMKM sebanyak 99,9%, sedangkan persentase pelaku UB di Indonesia hanya 0,01%. Peningkatan jumlah unit dan persentase pangsa UMKM dan UB tahun 2017-2018 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Peningkatan jumlah unit dan persentase pangsa UMKM dan UB tahun 2017-2018

Jenis usaha	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Jumlah (unit)	Pangsa (%)	Jumlah (unit)	Pangsa (%)
UMKM	2.928.077	99,9	64.194.057	99,9
UB	5.460	0,01	550	0,01

Sumber: Kemenkop dan UKM 2018 (diolah)

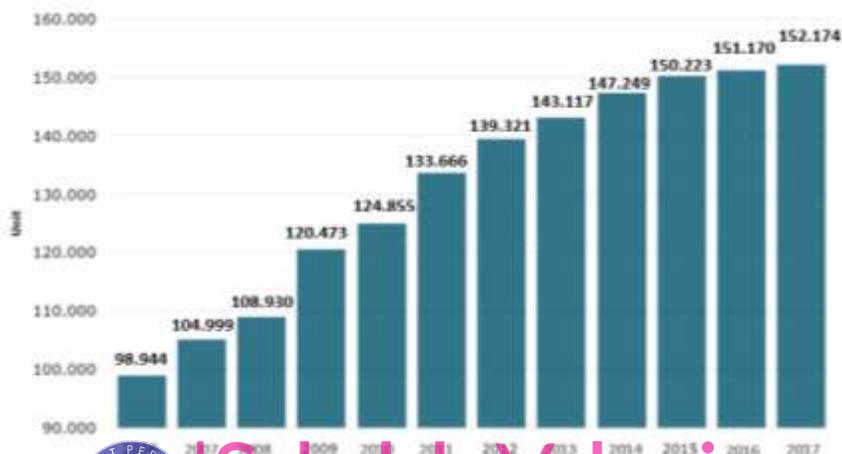
Banyaknya pelaku UMKM di Indonesia membuat UMKM memiliki andil yang besar pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan memberikan banyak kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan selalu meningkat setiap tahunnya. Persentase kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia pada tahun 2018 tercatat mencapai angka Rp8,6 kuadriliun. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia tahun 2016-2018

Sumber: Kemenkop dan UKM 2018 (diolah)

Banyaknya kontribusi yang diberikan UMKM kepada perekonomian Indonesia, membuat pemerintah terus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Alasan dipilihnya koperasi sebagai usaha yang turut didorong pertumbuhannya oleh pemerintah disamping UMKM, dikarenakan jumlah koperasi di Indonesia sejak tahun 2006 hingga tahun 2017 terus mengalami peningkatan dengan jumlah besar setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah koperasi di Indonesia mencapai 152.174 unit (BPS 2019). Grafik pertumbuhan jumlah koperasi di Indonesia tahun 2006-2017 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Perubahan jumlah koperasi di Indonesia tahun 2006-2017
Sumber: BPS (2019)

Salah satu persoalan yang sering dihadapi oleh UMKMK adalah keterbatasan modal. Oleh karena itu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan UMKMK ialah dengan menyelenggarakan Kredit Program. Kredit Program merupakan kredit/pembiayaan yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan UMKMK, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup: peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pasar produk UMKMK, dan reformasi regulasi UMKMK. Salah satu langkah dalam merealisasikan Kredit Program adalah dengan memberikan pembiayaan kredit bagi UMKMK melalui penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Kemenko 2015). UMKMK yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Berdasarkan data dari Kemenko, total realisasi penyaluran KUR tahun 2015 hingga tahun 2019 mencapai Rp478 triliun dengan nilai yang selalu meningkat setiap tahunnya. Penyaluran KUR yang terus meningkat membuktikan

bahwa penyaluran KUR di Indonesia terus berkembang dan ditatausahakan dengan baik. Realisasi penyaluran KUR tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Realisasi penyaluran KUR tahun 2015-2019

No.	Tahun	Penyaluran KUR (Rp)
1.	2015	22.750.320.000.000,00
2.	2016	94.428.150.000.000,00
3.	2017	96.325.679.000.000,00
4.	2018	124.695.433.000.000,00
5.	2019	140.120.418.000.000,00
	Total	478.320.000.000.000,00

Sumber: Kemenko 2018 (diolah)

Pemerintah membuat Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang berperan sebagai sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program KUR secara nasional. Tujuan dari penggunaan SIKP menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.253/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program ialah menghubungkan para pemangku kepentingan Kredit Program. Pihak-pihak pemangku kepentingan SIKP meliputi penyelenggara dan pengguna SIKP. Penyelenggara SIKP adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Penyelenggara SIKP bertugas sebagai penyedia sekaligus pengelola SIKP. Pengguna SIKP adalah lembaga penyalur KUR, penjamin, Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pengelola Dana, Kuasa Pengguna Anggaran, Kementerian Negara/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pengguna SIKP lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara.

PT Jamkrindo (Persero) sebagai perusahaan penjaminan yang berperan sebagai pihak penjamin KUR memiliki hak akses terhadap SIKP. Hak akses yang dimiliki PT Jamkrindo (Persero) pada SIKP adalah: (1) mengunggah data calon debitur, (2) mengunggah data sertifikat penjaminan, (3) mengunggah data klaim penjaminan, (4) mengunggah data subrogasi, dan (5) mengunduh laporan penyaluran KUR. Diantara hak akses SIKP yang dimiliki PT Jamkrindo (Persero) selaku penjamin, PT Jamkrindo (Persero) tidak memiliki hak akses untuk mengunduh data debitur yang diperlukan untuk melakukan analisis klaim. Selama ini analisis klaim KUR dilakukan dengan menggunakan dokumen fisik yang diberikan oleh mitra penyalur KUR sehingga tidak efisien dalam segi waktu dan biaya. Melihat kondisi tersebut, maka perlu dilakukan upaya penambahan hak akses pada SIKP untuk meningkatkan efisiensi analisis klaim KUR pada PT Jamkrindo (Persero).

1.2 Tujuan

Tujuan kajian pengembangan bisnis ini adalah:

1. Merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan dengan melakukan pengembangan bisnis peningkatan efisiensi analisis klaim kredit usaha rakyat pada PT Jamkrindo (Persero) Jakarta Pusat.
Menyusun perencanaan pengembangan bisnis peningkatan efisiensi analisis klaim kredit usaha rakyat pada PT Jamkrindo (Persero) Jakarta Pusat berdasarkan aspek non finansial dan finansial.

2 METODE KAJIAN PENGEMBANGAN BISNIS

2.1 Lokasi dan Waktu

Kajian pengembangan bisnis ini merupakan hasil dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Jamkrindo (Persero) yang beralamatkan di Jl. Angkasa Blok 09 Kav.6 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, 10610. Waktu pelaksanaan PKL adalah tiga bulan sejak tanggal 4 Maret 2020 hingga 4 Juni 2020.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam menyusun kajian pengembangan bisnis ini bersumber dari data primer dan sekunder baik yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data primer didapatkan melalui pengamatan secara langsung selama proses PKL, serta melalui wawancara dan diskusi dengan pembimbing lapangan dan karyawan PT Jamkrindo (Persero). Data sekunder diperoleh dari studi literatur, dokumentasi perusahaan berupa laporan tahunan dan berkas-berkas milik perusahaan, serta pencarian internet. Sumber dan teknik pengumpulan data dapat dilihat pada Tabel 3.